

Fraksi DPR Setuju Revisi UU IKN

PKS Menolak

Jakarta, MIMBAR - Sebanyak 8 fraksi DPR RI menyetujui revisi UU tentang perubahan atas UU 3/2022 tentang Ibukota Negara (IKN). Sementara Fraksi PKS menolak.

Adapun 8 fraksi yang menyetujui revisi UU IKN adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat dengan catatan.

Persetujuan kedelapan fraksi ini diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I di Komisi II DPR RI. Nantinya revisi UU IKN ini akan dibawa ke rapat paripurna.

■ Bersambung ke Hal 11



Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (net)

Usai Ancam 'Piting' Warga Rempang, Panglima TNI Minta Maaf

Jakarta, MIMBAR - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta maaf soal ucapan 'piting' pendemo di wilayah Rempang, Kepulauan Riau (Kepri). Yudo meminta maaf karena ucapannya membuat masyarakat salah menafsirkan kata 'piting' yang dia maksud.

"Saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf atas pernyataan kemarin yang mungkin masyarakat menilai seolah dipiting," kata Yudo dalam keterangan tertulis Pusat Penerangan TNI, Selasa (19/9).

Yudo menjelaskan, penggunaan kalimat itu biasa

■ Bersambung ke Hal 11

NU Minta Kekerasan di Rempang Dihentikan



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jakarta, MIMBAR - Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan agar penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan oleh pemerintah terhadap masyarakat Rempang, Batam terkait sengketa proyek strategis nasional (PSN) Eco City harus dihentikan.

Hal ini merupakan salah satu hasil Komisi Rekomendasi dalam Munas Alim Ulama dan Kombes NU tahun 2023 di Asrama Haji Jakarta, Selasa (19/9).

"Sikap kita dalam kasus Rempang ini penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam sengketa tanah rakyat harus dihentikan," kata Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla membacakan hasil rekomendasi tersebut.

■ Bersambung ke Hal 11

DPR Akan Panggil Investor



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (net)

KOMISI III DPR RI berencana bakal memanggil para pengusaha yang akan berinvestasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, terkait polemik rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Eco-city.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan, rencana pemanggilan itu dilakukan sebelum mereka memanggil Kapolri.

■ Bersambung ke Hal 11

Warga Dairi Protes Jalan Rusak

Dairi, MIMBAR - Ratusan masyarakat Tanah Pinem, Kabupaten Dairi tiga desa, Kempawa, Kuta Gamber dan Lau Primbon berarak-arak melintasi jalan yang rusak di desa mereka.

Hal itu sengaja dilakukan warga guna menyampaikan aspirasi, keluhan dan keresahan mereka kepada pemerintah. Terutama kepada Presiden Jokowi akibat

■ Bersambung ke Hal 11



Kasus Pengancaman Muhammadiyah

Eks Peneliti BRIN Divonis 1 Tahun

Jakarta, MIMBAR - Eks peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi

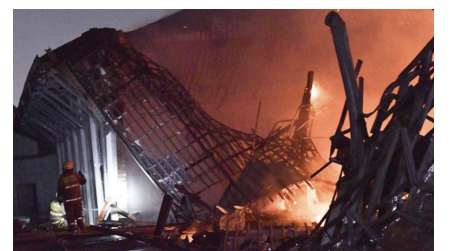
Pangerang (AP) Hasannudin divonis satu tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Neg-

eri (PN) Jombang, dalam kasus ujaran kebencian kepada warga Muhammadiyah.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebanyak Rp10 juta, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan selama satu bulan," kata Ketua Majelis Bambang Setyawan membacakan vonis, Selasa (19/9).

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menilai terdakwa Andi terbukti melanggar Pasal 45A ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

■ Bersambung ke Hal 11



Imbas Kebakaran Museum Nasional Ratusan Benda Bersejarah Rusak

Jakarta, MIMBAR - Ratusan benda bersejarah yang tersimpan di Museum Nasional mengalami rusak ringan hingga berat akibat kebakaran pada Sabtu (16/9) lalu.

Pt Kepala Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Ahmad Mahendra menyampaikan secara keseluruhan ada 194 ribu koleksi benda bersejarah yang tersimpan di Museum Nasional.

Dari jumlah itu, sebanyak 817 di antaranya tersimpan dan dipamerkan di enam ruangan yang terimbas kebakaran pada akhir pekan lalu.

"Terdapat 817 koleksi yang berada dan dipamerkan pada enam ruangan yang terdampak. Koleksi dan benda bersejarah tersebut merupakan koleksi berbahan perunggu, keramik, terakota, dan kayu serta koleksi miniatur dan replika benda prasejarah yang ditemukan dalam kondisi utuh maupun rusak ringan sampai berat," kata Ahmad dalam keterangannya, Selasa (19/9).

Disampaikan Ahmad, sejak insiden kebakaran pihaknya telah membentuk tim investigasi dan evakuasi lintas unit. Selain itu, juga menutup enam ruangan yang terdampak oleh Puslabfor dan penutupan terbatas pada 1 ruangan terdampak untuk investigasi lebih lanjut.

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

5 RABIUL AWAL 1445 H

Subuh : 05:01 WIB	Maghrib : 18:25 WIB
Zuhur : 12:22 WIB	Isya : 19:33 WIB
Ashar : 15:26 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Menempuh Jalan Lurus

Oleh Dr A Rasyid, MA

MENENTUKAN jalan hidup kita kepada jalan yang lurus adalah sangat penting. Sebab, dengan jalan lurus akan memberi efek positif bagi hidup kita. Kata shiratal mustaqim (jalan yang lurus) ini, paling tidak tersebar dalam 50 ayat di dalam Al Qur'an. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita berada pada jalan yang lurus, sebuah jalan kebenaran. Mengapa permintaan jalan lurus dalam hidup begitu penting dan sangat diutamakan dalam permohonan kita kepada Allah? Mengapa Alqur'an berulang kali menyebutnya?

■ Bersambung ke Hal 11

Prof. Dr. Fachruddin Azmi MA Respon Konflik Rempang

Ini Hubungannya dengan Filsafat Manajemen

MEMPERHATIKAN hiruk-pikuk tragedi Rempang, Batam, yang mengaduk perasaan serta menyayat sanubari kita sebagai anak negeri, miris melihat perlakuan para pemegang kekuasaan terhadap rakyatnya sendiri, diperlakukan semena-mena.

Demikian awal bincang-bincang kami bersama Prof. Fachruddin Azmi saat menghadiri Milad KAHMI ke 57, Ahad (17/9), bertempat gedung HMI Center Jl. Adinegoro 15 Medan.

Penanganan tragedi Rempang serta solusinya telah disampaikan beliau dalam seminar kelas Kandidat Doktor program MPI FTIK UINSU Topik "Filsafat Manajemen implementasinya meningkat Mutu Pembangunan Kualitas Sumber daya" beberapa waktu lalu di Kampus UIN Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang.

Merespon beberapa pertanyaan yang muncul terkait kondisi kekinian tentang Masalah Rempang, dan hubungannya dengan Filsafat Manajemen. Guru Besar Ilmu Administrasi ini mengemukakan, dengan metode pendekatan Filsafat Manajemen akan bermanfaat dan sangat memungkinkan mencapai keberhasilan dalam mengelola suatu program atau proyek bila benar-benar dapat diimplementasikan. Jika terjadi konflik dan



Abdul Aziz bersama Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA.

perlawanan yang serius dalam pengelolaan itu pastilah ada sesuatu yang salah (something wrong).

"Dalam masalah Rempang menyangkut PSN eco city terjadi tindakan represif pemerintah terhadap masyarakat atau warga Rempang," kata Fachruddin.

Hal ini, katanya, berkaitan erat dengan filsafat manajemen. Bila dilihat dari prespektif filsafat besar kemungkinan akar permasalahannya karena para pemegang kekuasaan tidak memahami dan tidak menjawainya.

■ Bersambung ke Hal 11

Usai Ancam...

Dari Halaman 1

digunakannya dalam konteks bukan kekerasan. Dia pun merasa tindakan tersebut lebih aman karena TNI tidak memiliki alat. "Itu saya enggak tahu karena bahasa saya itu orang ndeso, yang biasa mungkin melaksanakan dulu waktu kecil kan sering piting-pitingan dengan teman saya tuh. Saya pikir dipiting lebih aman, karena memang kita tak punya alat," terang mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSLA) ini.

"TNI tidak dilibatkan untuk tadi memakai alat seperti yang zaman dulu, tidak ada," tambah Yudo. Lebih lanjut Yudo mengatakan, pernyataannya soal 'piting' itu menjawab pertanyaan dari Pangdam. "Sudah saya sampaikan bahwa itu seumpama, tidak ada saya mengerahkan pasukan karena memang tidak ada permintaan pengerahan pusat pasukan sebanyak itu," ujar Yudo.

Sebelumnya dalam video yang tersebar, Yudo mengatakan, jika jumlah masyarakat 1.000 orang, maka akan dikerahkan personel TNI 1.000 orang juga.

Ia juga menegaskan tidak ada operasi militer di Batam. Menurutnya pasukan yang diminta merupakan bantuan kewilayahan seperti Kodim, Korem.

"Jadi tidak ada pengerahan pasukan bahkan saat awal sebelum terjadinya itu, saya sudah kirim Danpuspom TNI ke sini, jangan sampai TNI terlibat, kita kerahkan Puspom TNI untuk mengawasi itu, saya berharap pasukan TNI jangan arogan".

Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono juga telah menjelaskan soal pernyataan Panglima TNI tersebut. Laksda Julius menjelaskan konteks kalimat Panglima TNI.

"Jika dilihat secara utuh dalam video tersebut, Panglima TNI sedang menjelaskan bahwa demo yang terjadi di Rempang sudah mengarah pada tindakan anarkisme yang dapat membahayakan, baik aparat maupun masyarakat itu sendiri, sehingga meminta agar masing-masing pihak untuk menahan diri," kata Kapuspen TNI dalam keterangan pers, Senin (18/9).

Video ucapan Panglima TNI soal perintah

Warga Dairi...

Dari Halaman 1

kondisi jalan rusak di desa mereka yang sudah berlangsung lama hingga puluhan tahun.

"Ini aksi kami dari Forum Masyarakat Tengering (FMT) dari tiga desa menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada pemerintah. Yaitu Desa Kuta Gambir, Lau Primbon, Kempawa. Kurang lebih 35 kilometer jalan penghubung desa yang rusak kami telusuri dengan menggunakan puluhan kendaraan bak terbuka menyerukan perbaikan kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo," ujar Cahaya Ujung, selaku Sekretaris FMT didampingi Ligad Tarigan, pria kelahiran Tanah Pinem, Selasa (19/9).

Cahaya Ujung juga menerangkan bahwa rusaknya jalan tersebut menjadi batu sandungan bagi masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam.

"Pada akhirnya, masyarakat yang didominasi bercocok taman tanaman kemiri dan jagung kerap mengalami kerugian menjual hasil tani karena tingginya biaya transportasi mengangkut hasil tani akibat kondisi jalan yang rusak parah," terangnya didampingi koordinator Desa Gamber, Pierre Daniel Sebayang, Kabar Sembiring, Desa Lau Perimbon, Gerhana Leo Ujung dan Julkifi.

NU Minta...

Dari Halaman 1

Ulil menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi tak boleh dicapai dengan melanggar hak-hak rakyat kecil. Proses pembangunan, bagi NU, hanya sekadar sarana, namun tujuan akhirnya adalah kemaslahatan manusia itu sendiri.

"Karena itu, kemaslahatan manusia harus jadi pertimbangan pokok," kata dia.

Tak hanya itu, Ulil turut mendorong kepada masyarakat dan pemerintah untuk menenangkan diri atau cooling down dalam konflik ini. Ia juga meminta pemerintah harus mendengar aspirasi rakyat agar kepentingan investasi tak mengorbankan rakyat kecil.

Ulil mengatakan, soal pengambilan tanah rakyat oleh negara pun pernah dibahas dalam Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waq'iyah saat Mukhtamar ke-34 NU di Lampung.

PENGAMBILALIHAN LAHAN HARAM

"PBNU berpandangan bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqtha' (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya' (pengelolaan lahan),

maka hukum pengambilalihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram," katanya.

Hukum haram itu, kata Ulil, jika pengambilalihan oleh pemerintah dilakukan dengan sewenang-wenang. Meskipun demikian, sambungnya, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah rakyat dengan syarat sesuai ketentuan hukum perundang-undangan.

"Dengan tentu harus menghadirkan keadilan bagi rakyat pemilik dan/atau pengelola lahan," katanya.

Sementara, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, kesentosaan masyarakat harus nomor satu dalam konflik agraria yang terjadi antara warga dan proyek strategis nasional (PSN) Eco City di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

"Investasi itu harus dijadikan peluang, sungguh-sungguh dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Khususnya masyarakat yang ada di lingkungan destinasi investasi itu sendiri," kata Yahya.

"Masyarakat tidak boleh menjadi korban. Apa pun juga kesentosaan dari masyarakat itu nomor satu, risiko-risiko investasi itu hitungan kemudian," imbuhnya.

DPR Akan...

Dari Halaman 1

Mengutip dari situs resmi DPR, Sahroni menilai para pengusaha tersebut memiliki bekingan alias 'pelindung' dari pihak tertentu. Oleh karena itu, Komisi III menginginkan penjelasan detail dari para pengusaha tersebut.

"Banyak pihak yang terkait, dan ada dugaan para pengusaha yang dibekingi para pihak," kata Sahroni dikutip dari situs resmi DPR, Selasa (19/9).

Sahroni berpendapat penyelesaian konflik di Pulau Rempang tidak bakal berjalan dengan mulus. Menurutnya, konflik itu juga bisa menjadi landasan perhatian publik terkait bagaimana proses penegakan hukum di Indonesia.

Oleh sebab itu, Sahroni meminta agar pemerintah pusat lebih transparan dan akuntabel soal apa yang terjadi di Rempang. Di sisi lain, politikus NasDem itu juga berpendapat apabila penegakan hukum tidak dilakukan dengan adil maka Rempang justru bisa menjadi pulau preman dengan hukum rimba.

"Banyak dugaan mafia main di Pulau Rempang," ujar Sahroni.

TERANCAM

Ribuan warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau terancam harus meninggalkan tempat tinggalnya karena akan ada pembangunan kawasan Eco-city. Pembangunan itu masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) tahun ini.

Proyek yang bakal dikerjakan PT Makmur Elok Graha (MEG) itu akan menggunakan lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16 hektare.

Ribuan warga itu tak terima harus angkat kaki dari tanah yang sudah ditinggalinya jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Mereka gigih mempertahankan tempat tinggalnya, meski aparat TNI-Polri dikerahkan agar warga Rempang setuju direlokasi.

Bentrok tak terlakkan. Pada 7 dan 11 September 2023, bentrokan sempat pecah. Polisi menyempatkan gas air mata hingga anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Hingga saat ini, 43 orang yang menolak relokasi ditangkap dengan dituduh provokator.

PROVOKATOR

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut ada

Ini Hubungannya...

Dari Halaman 1

"Jika berangkat dari informasi dan fakta yang ada justru terindikasi mengabaikan Falsafah Pancasila yang sesungguhnya menjadi dasar sistem perundangan dan tatalaksana pemerintahan dalam mengelola, mengayomi dan melayani kepentingan sosial masyarakat, akibatnya seperti yang terjadi dalam kasus Rempang dan lainnya di Tanah air," ujar Fachrudin.

Saat Aziz mengajukan pertanyaan bagaimana penguasa Republik ini sedang mempresentasikan wajah negara dalam memandang musuh dalam setiap kepentingannya.

Fachrudin menyampaikan dengan lugas, pemerintah menempuh dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai peri kemanusiaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial yang sebenarnya telah dijabarkan pada perundang-undangan Republik Indonesia.

"Tindakan ini dapat berdampak pada persatuan dan kesatuan NKRI. Kesan tercerabutnya nilai-nilai itu tergambar dari tindakan dan ucapan para pejabat tinggi yang sangat tidak etis dan cenderung arogan serta mengandung aroma abuse of power, dan tidak mencerminkan good governance," ungkap Fachrudin.

Sikap mengabaikan fakta historis dan sosial

serta amanah konstitusi dan jeritan panjang yang dikemukakan masyarakat setempat dan kecaman berbagai kalangan.

Tentu hal ini sangat mengecewakan kita semua dan berdampak melukai hati rakyat dan hilangnya kepercayaan terhadap penyelenggara negara. Jika ini tidak segera di hentikan bukan saja akan menjadi preseden buruk tetapi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini dapat katagori tindakan melanggar nilai-nilai dasar falsafat bangsa Pancasila dan tindakan inkonstitusional melanggar UUD 1945.

Tindakan represif dalam bentuk pemaksaan, ancaman, penangkapan dan tuduhan menentang pemerintah tanpa memperhatikan suara dan tuntutan masyarakat dan hak-hak adat dan ulayat yang dijamin berdasarkan Undang-Undang Dasar pada pasal 18 ayat e dan semua perundangan-undangan yang ada, baik Undang-undang No.2 tahun 2012 maupun UU No. 25 tahun 2007, serta pedoman penyelenggaraan HAM yang terkait investasi dapat menjadi katagori pelanggaran HAM berat.

Abdul Aziz menilai, sangat keliru jika penguasa negara menganggap penduduk Pulau Rempang sebagai pendatang. Mereka sudah mendiami jauh sebelum Indonesia merdeka, turun temurun dari generasi ke generasi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, kita sangat berharap, sangatlah arif bila pemerintah meng-

hentikan program ini dan melakukan retrospekti kebijakan secara menyeluruh dan benar-benar taat asas dan konstitusi serta berpihak pada pelayanan, perlindungan dan pengayoman rakyat.

Filsafat Manajemen sebagai landasan dalam hal ini Filsafat Pancasila dielaborasi dalam domain ontologis epistemologis dan aksiologis. Dalam praktek ketatanegaraan UUD dan UU serta peraturan dan keputusan sampai pada petunjuk pelaksanaan atau SOP, kebijakan terkait semua haruslah konsisten dan menjawai filosofisnya. Harus terkoneksi dan terintegrasi apa lagi dioperasionalkan dengan filosofis yang beroperasi dan bertentangan. Ditanya kongkritnya Profesor Azmi menyatakan Filsafat Manajemen dalam hal ini di Indonesia Pancasila dielaborasi dalam domain ontologis, epistemologis dan aksiologis. Maka dalam praktek manajemen ketata negaraan UUD, UU, Peraturan, Keputusan sampai kepada JUKLAK atau SOP seluruhnya harus konsisten dan menjawai filsafatnya dan harus dijadikan landasan serta diimplementasi secara murni dan konsekuen.

Dimana Ontologinya menjadi dasar pertimbangan dan azas serta tujuan, epistemologinya tertuang pada bab dan pasal prosedur, mekanisme dan sistem penjaminan keterlaksanaan secara benar. Aksiologinya pada realisasi implementasi pelaksanaannya. (R/A-02)

Ratasan Benda...

Dari Halaman 1

Ahmad menuturkan proses evakuasi koleksi dan benda bersejarah dari Gedung A Museum Nasional Indonesia (MNI) sudah dilakukan sejak Senin (18/9). Setidaknya, hampir 100 orang dikerahkan oleh tim MNI bekerja sama dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

Proses evakuasi ini, kata Ahmad, juga melibatkan tim tenaga ahli khusus untuk mengangkat puing dengan diawasi serta diarahkan oleh tim evakuasi koleksi agar dapat mencermati dan mengambil tindakan yang tepat. Dalam prosesnya, lanjut dia, dibutuhkan beberapa alat berat dan teknik pengangkatan atap gedung yang rusak untuk proses evakuasi serta penyelamatan koleksi.

"Serta melakukan inventarisasi untuk memastikan bahwa setiap benda bersejarah tercatat dengan akurat dan akan mendapatkan perawatan yang diperlukan selama periode pemulihan ini. Beberapa di antaranya tidak mengalami kerusakan atau utuh, sementara yang lain mengalami tingkat kerusakan yang bervariasi," tutur dia.

Lebih lanjut, Ahmad menuturkan pihaknya bakal memberikan rincian detail terkait daftar koleksi-koleksi yang terdampak. Termasuk, soal langkah penanganan dan restorasi koleksi lebih lanjut setelah hasil investigasi resmi diperoleh dari Puslabfor Polri. "Kami juga telah membuka komunikasi dengan sejumlah tenaga ahli untuk dapat bekerja sama dan memberikan dukungan dalam proses penyelamatan dan restorasi seluruh koleksi yang terdampak serta pengelolaan museum dan cagar budaya yang lebih baik ke depannya," ucap dia.

Sebelumnya, kebakaran terjadi di Museum Nasional atau Museum Gajah pada Sabtu (16/9) sekitar pukul 20.00 WIB. Menurut seorang petugas kepolisian yang bertugas di TKP, api telah dipadamkan sebelum pukul 21.00 WIB. Sampai saat ini, proses penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran masih terus dilakukan. Sebanyak 21 saksi sudah diminta keterangan, termasuk mengamankan beberapa rekaman CCTV. Tak hanya itu, penyelidikan juga tengah mendalami soal dugaan unsur pidana dalam insiden kebakaran di Museum Nasional tersebut. (cnni/js)

Eks Peneliti...

Dari Halaman 1

Elektronik (ITE). Andi disebut dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan hal yang memberatkan hukuman Andi di antaranya adalah perbuatan terdakwa telah menimbulkan kegaduhan secara nasional, perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan rasa kebencian pada salah satu organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan persidangan. Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat merubah perilakunya di kemudian hari," ujar Hakim.

Usai mendengar vonis, terdakwa Andi melalui penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Demikian juga dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menyatakan hal yang sama. "Kami pikir-pikir yang mulia" kata penasihat terdakwa dan JPU secara bergantian.

LEBIH RENDAH DARI TUNTUTAN JAKSA

Vonis terhadap terdakwa Andi ini sendiri diketahui lebih rendah dari tuntutan jaksa. JPU Kejari Jombang, menuntut terdakwa dengan ancaman satu tahun dan enam bulan penjara.

Sebelumnya, kasus ini bermula saat seorang peneliti BRIN, Andi Pangeran Hasanuddin melontarkan ancaman lewat akun Facebook pribadinya. Andi berkomentar pada kolom komentar peneliti BRIN lainnya, Thomas Djomaluddin.

Ancaman itu disampaikan Andi kepada warga Muhammadiyah terkait perbedaan penetapan Idulfitri 1444 H. Seperti diketahui, Muhammadiyah melaksanakan Idulfitri pada Jumat (21/4), sementara Pemerintah menetapkan Idulfitri satu hari setelahnya. (cnni/js)

Fraksi DPR...

Dari Halaman 1

"Apakah kita bisa menyetujui rancangan undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu-kota Negara ini?" tanya Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, dalam rapat pleno, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9).

"Setuju," jawab mayoritas anggota.

"Dan kita sama-sama menyetujui untuk melanjutkannya kepada pembicaraan tingkat I dan kemudian untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang akan datang," tutup Ahmad Doli Kurnia.

Komisi II bersama Pemerintah dalam 3 hari ke belakang telah melakukan rapat pembahasan revisi UU IKN.

Ada 20 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang tidak berubah, 13 DIM mengalami perubahan redaksional, dan sikap semua fraksi sama terhadap 109 DIM, kecuali Fraksi Demokrat yang meminta penjelasan detail. Serta 80 DIM substansi yang dibahas bersama dalam revisi UU IKN. Adapun ketentuan yang diubah dalam UU IKN yakni ayat 1, ayat 2, ayat 3 Pasal 6 dan ditambahkan ayat (6). Lalu ketentuan pasal 15 ditambah 7 ayat, yaitu ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, dan ayat 11. Kemudian, di antara pasal 15 dan pasal 16, disisipkan satu pasal yaitu pasal 15A. Di antara pasal 16 dan pasal 17, disisipkan satu pasal yaitu pasal 16A. Dan ketentuan pasal 23 diubah, ketentuan pasal 24 diubah.

Selanjutnya, di antara pasal 24 dan pasal 25, disisipkan dua pasal yaitu pasal 24A dan pasal 24B. Selain itu, ketentuan pasal 25, pasal 26, pasal 32, dan pasal 36 diubah. Lalu, di antara pasal 36 dan pasal 37, disisipkan dua pasal yakni pasal 36A dan pasal 36B. Ketentuan mengenai luas dan batas wilayah juga diubah. (rm/js)



Menempuh Jalan...

Dari Halaman 1

Apa sesungguhnya jalan lurus itu? Selain jalan lurus (shiratul mustaqim) dalam Alqur'an Surat Al-Maidah ayat 16 disebutkan pula ada jalan keselamatan (subulus salam). Namun, yang paling populer adalah jalan yang lurus atau shiratul mustaqim yang banyak kita baca sehari-hari dalam surat al-Fatihah.

Bila kita pahami dari surat al-Fatihah, maka jalan yang lurus itu dimaksudkan adalah jalan orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai Allah dan bukan pula jalan orang yang sesat.

Menurut Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama, jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat itu adalah golongan orang yang menyimpang dari ajaran Islam.

Alquran surat Al An'am: 153: Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.

Jalan lurus itu tentu berbeda dengan jalan berliku. Jalan lurus adalah jalan yang diberi petunjuk oleh Allah Swt, Sang Maha Pencipta. Sedangkan jalan berliku adalah jalan yang membawa manusia kepada kesesatan. Inilah yang disebut jalan syaitan, bukan jalan Allah.

Kenyataan hari ini, banyak yang coba membawa bangsa ini ke jalan yang berliku, yang ke luar dari jalan yang lurus tersebut. Mereka memiliki kepentingan agar manusia lain tersesat di dalam jalan yang berliku itu.

Kenapa kita harus takut dan alergi dengan ajaran agama kita? Bukankah Islam sebagai suatu agama memberi petunjuk yang jelas untuk memperoleh rahmat Allah?

Jika demikian halnya, maka tidak ada salahnya agama dijadikan alat untuk meluruskan jalan kehidupan, baik yang berhubungan dengan persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya.

Sungguh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap mereka yang menjadikan agama sebagai alat untuk menempuh kebenaran hidup yang sesuai dengan yang digariskan Allah dalam kitab suci-Nya. Kecuali kita punya kepentingan untuk membuat mereka lari dari jalan lurus demi memperoleh kenikmatan sementara yakni kenikmatan duniawi. (*)